

ANALISIS PERAN LELANG TERHADAP PNBP TAHUN 2023 DI KPKNL MATARAM

Muhamad Taufikkurahman¹

Email: a0c022122@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Tri Hanani²

Email: trihanani@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Lelang merupakan aktivitas jual beli yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang secara khusus menangani pelaksanaan lelang. Pada tahun 2023, KPKNL Mataram mencatatkan capaian setoran hasil lelang sebesar 122%, yang berasal dari penjualan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi lelang terhadap PNBP, dengan fokus pada pelaksanaan di KPKNL Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dan metode deskriptif dalam penyusunan laporan, dengan data yang bersumber dari dokumen sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Mataram selama tahun 2023 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PNBP. Melalui kegiatan lelang, aset negara yang tidak lagi digunakan dapat dikelola secara optimal, sehingga menghasilkan pendapatan yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, lelang berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, lelang tidak hanya berperan dalam peningkatan PNBP, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara keseluruhan, peran lelang di KPKNL Mataram pada tahun 2023 menunjukkan potensi besar dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci : Peran, Lelang, KPKNL, PNBP

ABSTRACT

Auctions are buying and selling activities that are conducted openly and can be participated in by all levels of society. The Mataram State Property and Auction Service Office (KPKNL) is the only government agency that specifically handles the implementation of auctions. In 2023, KPKNL Mataram recorded auction proceeds of 122%, which came from the sale of two-wheeled and four-wheeled motor vehicles. This study aims to examine the contribution of auctions to non-tax state revenue, with a focus on the implementation at KPKNL Mataram. This study uses a field approach and descriptive methods in the preparation of reports, with data sourced from secondary documents. The results of the study show that the implementation of auctions at KPKNL Mataram during 2023 contributed significantly to the increase in PNBP. Through auction activities, state assets that are no longer in use can be managed optimally, thereby generating revenue that supports development financing and public services. In addition, auctions serve as an instrument of transparency and accountability in the management of state assets, as well as opening up space for public participation in the process. Therefore, auctions not only play a role in increasing PNBP, but also strengthen the

principles of good governance. Overall, the role of auctions at the Mataram KPKNL in 2023 shows great potential in supporting stability and growth.

Keywords: *Role, Auction, KPKNL, PNBP*

PENDAHULUAN

PNBP mencakup berbagai sumber pendapatan yang berasal dari aktivitas pemerintah selain pajak, dan merupakan salah satu unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ratia & Sartika, 2024). Secara khusus, lelang sebagai salah satu sumber PNBP menjadi sorotan karena prosedurnya yang melibatkan transaksi jual beli barang milik negara. Pendapatan yang dihasilkan dari lelang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Di KPKNL Mataram, pelaksanaan lelang diharapkan dapat meningkatkan PNBP yang signifikan, terutama dalam konteks ekonomi pasca-pandemi (Tsaurah et al., 2023).

Dalam pelaksanaan lelang, transparansi dan akuntabilitas adalah aspek penting untuk menarik minat pembeli. Lelang yang dilakukan secara terbuka dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan partisipasi dalam lelang dan akhirnya berimplikasi positif terhadap PNBP (Sibarani & Waskitojati, 2023). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhi lelang ini penting untuk dilakukan guna memastikan hasil yang diperoleh dapat maksimal dan mendukung penerimaan negara. Selain itu, berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan lelang juga perlu diidentifikasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi lelang, mulai dari rendahnya partisipasi pembeli, kurangnya pemahaman mengenai prosedur lelang yang tepat, hingga ketidakpuasan terhadap hasil lelang yang dapat berpengaruh pada kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas dapat membantu mengatasi beberapa masalah tersebut (Rambing & Nugraha, 2025).

Proses lelang di KPKNL Mataram diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi ini memberikan panduan bagi KPKNL dalam mengadministrasikan proses lelang, termasuk Pedoman Administrasi Lelang yang menetapkan hal-hal terkait dengan pelaksanaan, pengawasan, serta penetapan nilai limit aset yang akan dilelang (Ratia & Sartika, 2024; Fauzia, 2023). Proses ini mencakup tahapan seperti pengumuman lelang, penilaian aset, serta pelaksanaan lelang itu sendiri, yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran dan keadilan. Dalam konteks PNBP, hasil dari lelang aset negara secara langsung disetorkan ke kas negara, menambah capaian realisasi PNBP yang sangat diperlukan dalam pengembangan ekonomi nasional. Keberhasilan KPKNL Mataram dalam mengelola lelang akan berdampak pada peningkatan PNBP secara keseluruhan. Hal ini juga berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi melalui efisiensi pengelolaan aset negara (Tsaurah et al., 2023; Iqbāl et al., 2023).

Evaluasi kinerja pelaksanaan lelang di KPKNL Mataram perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak lelang terhadap PNBP. Pengukuran ini tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga aspek sosial dan hukum, termasuk kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap transparansi dalam proses lelang (Sudrajat & Hariati, 2022). Hasil evaluasi ini dapat memberikan wawasan penting untuk perbaikan prosedur dan pelaksanaan lelang di masa depan.

Pada tahun 2022, KPKNL Mataram bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan seluruh unit Kementerian Keuangan di wilayah Lombok, dalam semangat “Kementerian Keuangan Satu”, menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Lelang Amal Merchandise MotoGP, UMKM dan Fashion Show” yang berlangsung pada Rabu, 26 Oktober 2022 di paddock Sirkuit Internasional Mandalika. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 10 item

official merchandise MotoGP berhasil dilelang, termasuk dua topi Marc Marquez, satu topi dan sepasang sarung tangan Maverick Vinales, serta tiga kemeja dan tiga kaos bertanda tangan Marc Marquez, Miguel Oliveira, dan Pol Espargaro. Seluruh barang yang dilelang berhasil terjual. Total hasil lelang mencapai Rp48.093.000, dengan rincian Rp46.442.750 diserahkan kepada pihak MGPA dan Rp1.650.250 disetorkan ke kas negara sebagai bea lelang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KPKNL Mataram – Serahkan Hasil Lelang Amal Official Merchandise MotoGP ke MGPA, (www.djkn.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan lelang menjadi isu strategis dalam upaya peningkatan PNBP, mendorong dinamika ekonomi melalui transaksi jual-beli, serta memperkuat posisi DJKN sebagai revenue center dalam struktur penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menyusun Laporan Magang dengan judul: “Analisis Peran Lelang terhadap PNBP Tahun 2023 di KPKNL Mataram.”

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Lelang

Lelang adalah suatu proses penawaran harga di mana barang atau jasa dijual kepada penawar tertinggi dalam suasana yang terbuka. Dalam konteks pengelolaan kekayaan negara, lelang sering digunakan untuk menjual aset-aset yang tidak terpakai, termasuk barang sitaan, yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Proses lelang dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta untuk mendapatkan harga yang optimal bagi aset-aset tersebut (Sibarani & Waskitojati, 2023; Tsaurah et al., 2023).

Lelang di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan lelang (Rambing & Nugraha, 2025). KPKNL memiliki peran utama dalam menjalankan proses ini, termasuk perencanaan, pelaksanaan lelang, dan pengawasan Tantowi et al., 2023).

Definisi PNBP

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) merupakan sumber pendapatan bagi negara yang tidak termasuk dalam kategori pajak. PNBP terdiri dari berbagai elemen, termasuk hasil dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas barang milik negara, dan dirancang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan negara (Cipta & Ariana, 2023; Ratia & Sartika, 2024). PNBP dari lelang ini sangat penting karena memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan negara, dan selanjutnya digunakan untuk program pembangunan nasional.

Peran lelang terhadap PNBP meliputi teori ekonomi dan teori manajemen. Dalam konteks ini, teori ekonomi menjelaskan bahwa lelang berfungsi sebagai mekanisme pasar yang efisien untuk menentukan harga barang yang akan dijual, yang berdampak langsung pada nilai PNBP yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Efisiensi lelang dapat mengoptimalkan pendapatan negara, karena membuka peluang bagi banyak penawar untuk bersaing, sehingga meningkatkan potensi harga yang diperoleh (Permana et al., 2023; IqbAl et al., 2023).

Selain itu, teori manajemen menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan lelang. Praktik lelang yang transparan tidak hanya mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga meningkatkan partisipasi peminat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PNBP (Fauzia, 2023). Manajemen yang baik dalam proses lelang juga mencakup penggunaan teknologi dan inovasi, seperti sistem lelang daring, yang dapat

memperluas jangkauan peserta lelang dan meningkatkan efisiensi proses lelang itu sendiri (Pamungkas & Harjono, 2023; Tantowi et al., 2023).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas lelang dalam kontribusinya terhadap PNBP meliputi:

1. Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan pemerintah yang jelas dan regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan lelang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka (Ratia & Sartika, 2024; Arista et al., 2024).
2. Partisipasi Publik: Tingginya partisipasi dari masyarakat dalam lelang akan berkontribusi pada nilai PNBP yang dihasilkan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang proses lelang sangat diperlukan (BP & Shadiq, 2018).
3. Inovasi Teknologi: Penggunaan teknologi dalam lelang, seperti platform lelang daring, sangat berpengaruh dalam menarik minat penawar dan memberikan kenyamanan dalam proses lelang (Pamungkas & Harjono, 2023; Tantowi et al., 2023).
4. Pemasaran dan Sosialisasi: Strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan lelang dan memberikan info yang jelas serta akurat kepada calon pembeli dapat meningkatkan transaksi dan hasil lelang (Kamsilaniah et al., 2023; Ananta et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Tujuannya adalah untuk menganalisis kontribusi kegiatan lelang terhadap realisasi PNBP di KPKNL Mataram tahun 2023, baik secara nominal maupun persentase terhadap total PNBP.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan penelitian adalah antara Agustus sampai Desember dengan fokus pada data tahun anggaran 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi: Seluruh data kegiatan lelang dan penerimaan PNBP di KPKNL Mataram tahun 2023.

Sampel: Data lelang yang menghasilkan PNBP, termasuk lelang eksekusi, lelang sukarela, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang barang milik negara (BMN).

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi: Mengakses laporan realisasi PNBP dan data kegiatan lelang tahun 2023.
2. Wawancara semi-terstruktur: (opsional) dengan pejabat KPKNL untuk memahami strategi peningkatan PNBP melalui lelang.
3. Observasi secara tidak langsung: Melalui studi terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan lelang.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Lelang
2. Menentukan peran Lelang
3. Menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram merupakan unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Awalnya,

kantor pelayanan ini bernama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Mataram yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 425/KMK.01/2002.

Dengan adanya reorganisasi di lingkungan Menteri Keuangan maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dibentuklah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengganti DJPLN. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dibentuklah KPKNL Mataram sebagai pengganti KP2LN Mataram.

Lelang merupakan kegiatan jual/beli yang didahului dengan pengumuman. Kegiatan jual beli barang melalui lelang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, karena semua orang bisa mengikuti pelaksanaan lelang melalui web lelang kecuali Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, juru Sita, Pengacara/advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Peegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Pejabat Kelas II, dan pihak yang tereksekusi/debitur/tergugat/terpidana yang terkait dengan proses lelang. Pelaksanaan lelang menjadi bagian tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pengelolaan aset pada Kator Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan dengan baik. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan yang baik harus memenuhi (empat) kriteria, yaitu terdiri dari dapat dipahami, relevan, kendalaan dan dapat dibandingkan. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan baik.

Pengaruh Lelang terhadap Kekayaan Negara Lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka, lisan atau tertutup atau tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.

Setoran PPh final yang berasal dari lelang eksekusi hak tangguhan yaitu pajak atas pengalihan hak tanah dan bangunan ternyata memberikan kontribusi terbesar. Karena semakin tinggi realisasi pokok lelang pada KPKNL maka semakin tinggi pula pajak yang disetorkan ke kas Negara yang menjadi salah satu penghasilan kekayaan Negara.

Peran Lelang Terhadap Kas Negara

1. Meningkatkan Penerimaan Kas Negara

Penjualan barang yang melalui lelang sebagai salah satu wujud dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga berperan penting dalam kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan lelang berasal dari Bea Lelang dan Penerimaan lainnya seperti:

- a. Bea Permohonan Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- b. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi/Ingkar janji

- c. Denda Kerlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II
- d. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang
- e. Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang
- f. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II
- g. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II
- h. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II
- i. Penerbitan Kutipan Lelang Pengganti Karena Rusak atau Hilang
- j. Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas I.

Adapun jenis-jenis barang yang di lelang oleh KPKNL Mataram pada tahun 2023 seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bongkarannya, kios/ruko, inventaris, tanah dan bangunan, dan cinderamata. Berikut adalah grafik kenaikan pertriwulan dari jenis barang kendaraan roda 2 dan roda 4 tahun 2023.



Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang. Dapat di lihat dari grafik di atas, pelaksanaan lelang triwulan pertama di KPKNL Mataram pada tahun 2023 diperoleh PNBP sebesar Rp 20.303.265, triwulan kedua Rp 6.363.660, triwulan ketiga Rp 47.034.709, dan pada triwulan keempat sebesar Rp 78.229.128. Pencapaian lelang di triwulan kedua Menurun dari triwulan sebelumnya, pada triwulan ketiga mulai ada peningkatan dari triwulan kedua, dan pada triwulan keempat terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari triwulan sebelumnya. Total keseluruhan dari PNBP pada tahun 2023 sebesar Rp 124.071.760 Capaian PNBP lelang tahun 2023 pada setiap triwulan merupakan kontribusi dari Pejabat Kelas I, dan Kelas II. Seluruh hasil akhir dari PNBP lasung di serahkan ke pemerintah pusat selaku pegelola keuangan negara.

Tabel 1.
Presentase Lelang Ke PNBP di KPKNL Mataram

TANGGAL REGISTER	JENIS BARANG	Unit		BEA LELANG	% PNBP
Triwulan I	KENDARAAN RODA 2	13 Unit	868.883	20.303.265	16%
	KENDARAAN RODA 4	12 Unit	19.434.382		
Triwulan II	KENDARAAN RODA 2	4 unit	334.870	6.353.660	5%
	KENDARAAN RODA 4	6 unit	6.018.790		
Triwulan III	KENDARAAN RODA 2	40 unit	3.011.219	47.034.709	38%
	KENDARAAN RODA 4	17 unit	22.193.278		
Triwulan IV	KENDARAAN RODA 2	143 unit	14.371.078	78.229.128	63%

KENDARAAN RODA 4	49 unit	63.858.050		
Total			124.071.760	122%

Dapat di lihat dari tabel presentase diatas Pada triwulan I KPKNL Mataram menyetorkan PNBP sebesar 16%, pada triwulan II menyetorkan sebesar 5% triwulan III menyetorkan sebesar 38%, dan pada triwulan IV menyetorkan sebesar 63%. Jadi total kesluruhan KPKNL Mataram menyetorkan PNBP tahun 2023 sebesar 122%. Terjadinya penurunan yang sangat jauh pada triwulan kedua di bandingkan dengan triwulan pertama, dan pada triwulan ketiga mulai ada peningkatan, dan pada triwulan keempat mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan. Jadi KPKNL Mataram sudah menjalani peran meraka dengan sangat bagus di bidang lelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 di KPKNL Mataram menunjukkan bahwa lelang memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan PNBP. Jenis barang yang di lelang seperti kendaraan roda 2 dan roda 4. Melalui pelaksanaan lelang, KPKNL Mataram berhasil mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang tidak terpakai, sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. Lelang juga berfungsi sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan demikian, lelang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PNBP, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan aset negara. Secara kesluruhan, peran lelang di KPKNL Mataram pada tahun 2023 menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung perekonomian negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram sebagai instansi pemerintah yang tugas pokoknya di bidang lelang yang dikenakan Bea Lelang disarankan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar pemungutan Bea Lelang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dikarenakan Bea Lelang merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram diharapkan terus mempertahankan penatausahaan Bea Lelang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

REFERENSI

- Ananta, G., Wiranatakusuma, D., Aru, Y., Yudiyanto, A., & Dewi, N. (2024). Kajian Stabilitas Keuangan Bank Syariah: Pendekatan Literature Review. *JBHI*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i3.164>
- Arista, A., Muliawati, A., & Rahayu, T. (2024). Pengenalan Pemanfaatan Basis Data (Database) Pada Microsoft Excel Pada Kantor Desa Untuk Membantu Pencatatan Dan Pengelolaan Data. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 1133. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20636>
- BP, A. and Shadiq, A. (2018). Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor. *Syariati*, 4(02), 233-246. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1180>
- Cipta, L. and Ariana, I. (2023). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Keamanan, Dan Kepuasan Aplikasi Whatsapp Bisnis Terhadap Kualitas Pelayanan KPKNL Denpasar. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(1), 98-103. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i1.1791>
- Fauzia, F. (2023). Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan. *Recital Review*, 5(1), 118-134. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22758>

- Iqbal, M., Hafidzi, A., & Hanafiah, M. (2023). Prosedur Pelaksanaan Lelang Di KPKNL Kanwil Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *IJIJEL*, 1(4), 965-975. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.291>
- Kamsilaniah, K., Juliati, J., Tira, A., & Aswari, F. (2023). Analisis Hukum Pengembalian Sisa Hasil Lelang Objek Jaminan Hak Tanggungan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 490-495. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2209>
- Pamungkas, A. and Harjono, H. (2023). Pelaksanaan Lelang Daring Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Di Kpknl Surakarta. *Verstek*, 11(1), 011. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70835>
- Permana, S., Susiloningtyas, D., Sukoraharjo, S., & Rozali, R. (2023). Analisis Kesiapan Implementasi Aplikasi Fish Auction Information System (Fais) Menggunakan Model E-Learning Readiness. *Jurnal Kelautan Nasional*, 18(3), 243. <https://doi.org/10.15578/jkn.v18i3.13476>
- Rambing, D. and Nugraha, D. (2025). Pemenuhan Pemenang Lelang Hak Tanggungan Aset Cessie Setelah Proses Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bogor. *LP*, 3(2). <https://doi.org/10.19166/lp.v3i2.9111>
- Ratia, M. and Sartika, N. (2024). Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Atas Bea Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Xxx. *Account*, 11(1), 2185-2194. <https://doi.org/10.32722/account.v11i1.6690>
- Sibarani, K. and Waskitojati, L. (2023). Relevansi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Sengketa Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 14(2), 174-186. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.35034>
- Sudrajat, H. and Hariati, R. (2022). Profil Kehadiran Siswa Di Kelas Dalam Mewujudkan Kedisiplinan Siswa. *EJMI*, 1(2), 83-92. <https://doi.org/10.54723/ejpmi.v1i2.11>
- Tantowi, M., Iqbal, M., Rizky, M., Kurniawan, I., Mahabbati, L., Fazadilla, A., ... & Yeyen, Y. (2023). Upaya Legalitas UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Wicara Desa*, 1(6), 962-972. <https://doi.org/10.29303/wicara.v1i6.3473>
- Tsaurah, Z., Fuad, F., & Salim, M. (2023). Penyelesaian Sertifikasi Barang Milik Negara Pada Bidang Tanah Bersertifikat Lainnya. *Tunas Agraria*, 6(3), 220-236. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.243> (www.djkn.kemenkeu.go.id).